



JURNAL EDUKATIF

Vol 1. No 2. 2023: Hal. 159-167

E-ISSN: 3025-0544

<https://ejournal.edutechjaya.com/index.php/edukatif>

DINAMIKA PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA PENJAJAHAN

Supriatun

SDN 107396 Paluh Merbau

Email: supriatunsag@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana dinamika pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi pendidikan Islam di zaman Belanda, berbagai macam kebijakan dan pendekatan telah dilakukan oleh Belanda dalam wilayah jajahannya, yang umumnya kebijakan mereka merugikan masyarakat. Menjelang abad ke-20 ada beberapa kebijakan pendidikan Belanda di Indonesia yang secara signifikan berpengaruh terhadap pendidikan yaitu Politik Etis dan Ordonansi Guru. Sedangkan pada masa penjajahan Jepang sistem pendidikan yang berorientasi kepada kepentingan perang. Tujuan pendidikan pada masa Jepang adalah menyediakan tenaga Cuma-cuma untuk membantu peperangan bagi kepentingan Jepang. Oleh karena itu, murid-murid diharuskan latihan fisik, latihan kemiliteran dan indroktinasi yang sangat ketat.

Kata Kunci: Pendidikan, Islam, Penjajahan

ABSTRACT

This study aims to describe how the dynamics of Islamic education during the Dutch and Japanese colonial periods. This research uses qualitative literature study techniques. The results of this study show that the condition of Islamic education in the Dutch era, various kinds of policies and approaches have been carried out by the Dutch in their colonies, which generally their policies harm the community. By the 20th century there were several Dutch education policies in Indonesia that significantly influenced education, namely the Ethical Politics and the Teacher Ordinance. While during the Japanese colonial period, the education system was oriented to the interests of war. The purpose of education during the Japanese period was to provide free labor to help fight for Japanese interests. Therefore, students are required to have physical training, military training and very strict indroktionation.

Keywords: Education, Islam, Colonialism

Pendahuluan

Perjalanan pendidikan Agama Islam di Indonesia sesungguhnya sama tuanya dengan usia Islam di Indonesia. Pada saat Islam masuk ke Indonesia, bersamaan dengannya pendidikan Islam telah pula dimulai. Kebutuhan akan lembaga pendidikan pada masa awal masuknya Islam di Indonesia merupakan sebuah keniscayaan, karena untuk dapat menyebarluaskan ajaran Islam ke penjuru nusantara memerlukan juru dakwah yang handal, dan juru dakwah tersebut hanya dapat diperoleh melalui lembaga pendidikan Islam kalasik, seperti pesantren.

Napak tilas perjalanan panjang pendidikan Islam di Indonesia menjadi sebuah kajian menarik dan sangat relevan dengan kemajuan lembaga-lembaga pendidikan Islam hari ini. Dahulu ketika awal mula Islam masuk ke Indonesia lembaga pendidikan yang didirikan oleh ulama-ulama kharismatik masih sangat sederhana tetapi mampu menyebarkan Islam dan berhasil menjadikan Islam sebagai agama yang dominan di negeri ini. Saat ini pun kemajuan lembaga-lembaga pendidikan Islam berkontribusi cukup besar pada pengembangan peradaban bangsa Indonesia. Dengan melihat masa lalu, banyak pelajaran yang dapat diambil untuk dapat menentukan sikap dan langkah pada hari ini dan masa yang akan datang. Oleh karena itu mengenang kembali keberhasilan sistem pendidikan klasik di Nusantara yang dulu pernah ada dan sekarang sebagian sudah lenyap ditelan masa adalah hal yang sangat penting.

Makalah ini akan coba merangkum bagaimana *rihlah* (perjalanan) pendidikan Islam di Indonesia dimulai dari zaman klasik hingga kontemporer hari ini, oleh karena luasnya cakupan pembahasan tersebut maka penulis hanya akan membatasi kajian pada seputar latar belakang terbentuknya lembaga pendidikan Islam di Indonesia lembaga-lembaga pendidikan Islam pada masa awal, pendidikan Islam pada masa penjajahan, pendidikan Islam pada masa kemerdekaan dan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional serta pendidikan tinggi Islam.

Sejarah mencatat bahwa Islam telah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 M dan baru beberapa tahun kemudiannya berkembang yaitu kira-kira pada abad ke-13 M. Meluasnya Islam ditandai dengan berdirinya kerajaan Islam yang tertua di Indonesia, seperti kerajaan Peurlak dan Samudera Pasai di Aceh pada tahun 1292 M dan tahun 1297 M. Perkembangan dan penyebaran Islam saat itu melalui zona perdagangan di daerah pantai Sumatera dan melalui urat nadi perdagangan di Malaka, agama Islam kemudian menyebar ke pulau Jawa dan seterusnya ke Indonesia bagian Timur, perluasan Islam ketika itu suasananya dalam keadaan perang, namun menariknya, Islam masuk ke Indonesia melalui peralihan agama Hindu dan masuknya Islam ke Indonesia melalui jalan damai (Hasbullah, 1999). Sebagaimana masuknya Islam ke daerah-daerah sebelumnya Islam masuk dengan membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai hal, terutama pada bidang peradaban dan ilmu pengetahuan (Napitupulu, 2019).

Masuknya ajaran Islam ke Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pengaruh pendidikan, di mana dalam mengajarkan agama Islam ketika itu masih memakai metode dakwah, yaitu seperti ceramah dan dialog interaktif. Agama Islam sebagai agama perdamaian sangat mudah diterima oleh masyarakat Indonesia hal tersebut terbukti dengan mudah agama Islam diterima di kalangan masyarakat Indonesia. Dalam proses pembentukan dan pengembangan masyarakat Islam yang juga melalui kontak, misalnya kontak jual beli, perkawinan dan keadaan tersebut berlangsung secara individual dan kolektif.

Berbicara tentang pendidikan Islam di Indonesia, sangat erat kaitannya dengan kedatangan Islam itu sendiri ke Indonesia. Dalam konteks ini, Mahmud Yunus mengatakan bahwa sejarah pendidikan Islam sama tuanya dengan masuknya Islam ke Indonesia. Hal ini disebabkan karena pemeluk agama tersebut sudah barang tentu ingin mempelajari dan mengetahui lebih mendalam tentang ajaran-ajaran Islam. Ingin pandai salat, berdoa, dan membaca Alquran. Inilah kemudian yang menyebabkan timbulnya proses belajar, meskipun dalam pengertian yang sangat sederhana. Dari sinilah mulai timbul pendidikan Islam, di mana pada mulanya mereka belajar di rumah-rumah, langgar/surau, masjid dan kemudian berkembang menjadi pondok pesantren. Setelah itu, baru timbul sistem madrasah yang teratur sebagaimana yang kita kenal sekarang ini (Nizar, 2007).

Kendatipun pendidikan Islam dimulai sejak pertama Islam itu sendiri menancapkan dirinya ke pulau Nusantara, namun secara pasti tidak dapat diketahui bagaimana cara pendidikan pada masa permulaan Islam di Indonesia, tentang buku yang dipakai, pengelolaan dan sistem pendidikan. Hal ini disebabkan karena bahan-bahan yang terbatas. Namun dapat dipastikan, pendidikan Islam waktu itu telah ada, tetapi dalam bentuk yang sangat sederhana.

Namun demikian, secara khusus, tulisan ini ingin melihat lebih dekat lagi bagaimana dinamika atau situasi pendidikan Islam pada saat penjajahan Belanda dan Jepang.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif disebut juga dengan interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel, penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan (Suyoto & Sodik, 2015). Dalam hal pengumpulan data teknik yang digunakan ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang terdiri dari reduksi data, penampilan data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Pendidikan Islam pada Masa Penjajahan Belanda

1. Sistem Pendidikan Islam Zaman Belanda

Sebelum kedatangan bangsa Eropa, termasuk Belanda, pendidikan Islam sudah ada dan mulai berkembang ke seluruh pelosok tanah air. Walaupun pelaksanaannya masih sangat sederhana jika dibandingkan dengan perkembangan setelah kedatangan bangsa Belanda. Pendidikan Islam berjalan dan berkembang seiring dengan dakwah dan penyebaran Islam itu sendiri, baik dari kalangan masyarakat maupun istana raja-raja.

Sebelum membicarakan sistem pendidikan Islam ada baiknya hal yang perlu diketahui adalah sistem pendidikan kolonial Belanda di Indonesia dan kaitannya dengan kepentingan penjajah. Ekonomi dan penjajah, menjadi unsur penting yang senantiasa dikaitkan dengan sistem pendidikan Belanda. Dalam hubungannya dengan kepentingan itu, maka para penyusun konsep pendidikan, agaknya tak dapat melepaskan diri dari kondisi sosial ekonomi dan politik pemerintahan pusat Nederland dan kaitannya dengan kepentingan politik Hindia Belanda (Nasution, 1987). Dengan demikian setiap kebijakan yang dijalankan di bidang pendidikan cenderung berkaitan dengan kepentingan politik kolonial Belanda di Indonesia (Ramayulis, 2009).

Kedatangan bangsa Barat memang telah membawa kemajuan teknologi, tetapi tujuannya adalah untuk meningkatkan hasil penjajahannya, bukan untuk memakmurkan bangsa yang dijajah. Begitu pula di bidang pendidikan. mereka memperkenalkan sistem dan metode baru tetapi sekedar untuk menghasilkan tenaga yang dapat membantu kepentingan mereka dengan upah yang murah dibandingkan dengan mereka harus mendatangkan tenaga kerja dari Barat. Belanda menyebut pembaharuan pendidikan itu adalah *westernisasi* dan *kristenisasi* yakni untuk kepentingan Barat dan Nasrani. Dua motif inilah yang mewarnai kebijaksanaan penjajahan Barat di Indonesia selama lebih kurang setengah abad (Depdikbud, 1979).

Pemerintah Belanda mulai menjajah Indonesia pada tahun 1619 M, yaitu ketika Pieter Zoon Coen menduduki Jakarta dan dilawan oleh Sultan Agung Mataram yang bergelar Sultan Abdurrahman Khalifatullah Sayidin Panotogomo. Sejak dari zaman VOC kedatangan mereka di Indonesia sudah bermotif ekonomi, politik dan agama. Ketika Van Den Boss menjadi Gubernur Jenderal di Jakarta pada tahun 1831, keluarlah kebijaksanaan bahwa sekolah-sekolah gereja dianggap dan diperlukan sebagai sekolah pemerintah. Departemen yang mengurus pendidikan dan keagamaan dijadikan satu. Pada tiap daerah keresidenan didirikan satu sekolah agama Kristen.

VOC telah mendirikan sekolah pertama sekali di Ambon pada tahun 1607. Tujuan dari didirikannya sekolah ini tidak lepas dari semangat keberagaman orang-orang Belanda yang protestan berhadapan dengan paham keagamaan Katolik yang dianut oleh Portugis. Karena itu,

pendirian sekolah-sekolah dalam tahapan awal diutamakan di daerah-daerah yang pernah dimasuki Portugis. Sejak didirikannya sekolah yang pertama itu, maka secara bertahap berkembang dan berdiri pula di daerah-daerah lain. Misalnya, di Ambon sendiri pada tahun 1627 telah berdiri 16 buah sekolah dan pada tahun 1645 meningkat menjadi 33 buah. Tujuan utama mendirikan sekolah-sekolah ini adalah untuk melenyapkan agama Katolik dengan menyebarkan Protestan. Sekolah-sekolah tersebut berkembang di sekitar kepulauan Maluku.

Pada masa kolonial Belanda pendidikan Islam disebut juga dengan pendidikan Bumiputera, karena yang memasuki pendidikan Islam seluruhnya orang pribumi Indonesia. Pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda ada tiga macam, yaitu: (1) Sistem pendidikan peralihan Hindu Islam; (2) Sistem pendidikan surau; dan (3) Sistem pendidikan Pesantren.

2. Sistem Pendidikan Peralihan Hindu Islam

Sistem ini merupakan sistem pendidikan yang masih menggabungkan antara sistem pendidikan Hindu dengan Islam. Pada garis besarnya, pendidikan dilaksanakan dengan menggunakan dua sistem, yakni sistem *keraton*; dan sistem *pertapa*.

Sistem pendidikan *keraton* ini dilaksanakan dengan cara guru mendatangi murid-muridnya, yang menjadi murid-muridnya adalah anak-anak para bangsawan dan kalangan keraton. Sebaliknya, sistem *pertapa* yaitu para murid mendatangi guru ke tempat pertapaannya (rumah). Adapun murid-muridnya tidak lagi terbatas golongan bangsawan dan kalangan keraton, tetapi juga rakyat jelata (Ramayulis, 2012).

3. Pengaruh Kebijakan Kolonial Belanda terhadap Pendidikan Islam

Penyelenggaraan pendidikan di Hindia Belanda tidak terlepas oleh kepentingan politik yang senantiasa menjadi bahan pertimbangan. Sistem pendidikan harus diselenggarakan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh kolonial Belanda, dalam kedudukannya sebagai penguasa politik di wilayah jajahan. Pengadaan Departemen Pendidikan, Agama, dan Pemerintahan dalam jajaran pemerintahan kolonial di Hindia Belanda (Sukardjo, 2009), memberi gambaran secara resmi akan adanya tugas dan tanggung jawab moral pemerintahan (kolonial) bagi pembinaan pendidikan rakyat di wilayah kekuasaannya, atau setidaknya-tidaknya secara politik, keberadaan Departemen tersebut dapat memberi kesan kepada dunia internasional bahwa Belanda berkeinginan keras untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat pribumi melalui pendidikan.

Seperti pada wilayah jajahan lainnya, Curacao dan Suriname maka Hindia dan Belanda (Indonesia) juga diatur oleh Menteri Urusan Daerah Jajahan, atas nama Pemerintahan Belanda. Wali negara, dalam hal ini Gubernur Jendral bertanggungjawab kepada raja dan ratu Belanda, melalui Menteri Jajahannya, terutama mengenai sesuatu yang berhubungan dengan Hindia Belanda termasuk masalah pendidikan.

Selama tiga setengah abad Belanda menjajah wilayah Nusantara, berbagai macam kebijakan dan pendekatan telah dilakukan oleh Belanda dalam wilayah jajahannya, yang umumnya kebijakan mereka merugikan masyarakat secara umum. Menjelang dan awal abad XX ada beberapa kebijakan Belanda di Indonesia yang secara signifikan berpengaruh terhadap pendidikan. Setidaknya ada dua kebijakan yaitu Politik Etis dan Ordonansi Guru.

4. Politik Etis

Politik etis dapat diartikan dengan politik balas budi, sehingga adanya perubahan kebijakan politik Belanda terhadap Indonesia sebagai jajahannya. Selama ini politik yang diterapkan Belanda hanya menghisap dan mengeksploitir seluruh kekayaan Indonesia untuk kemakmuran Belanda. Akibat politik ini kesengsaraan Indonesia terjadi dimana-mana, maka mulai tahun 1901 Belanda menerapkan politik etis, sehingga Belanda mulai memperhatikan nasib jajahannya.

Sejalan dengan penerapan politik etis, usaha untuk meningkatkan sekolah pemerintah yang netral agama mulai dilakukan. Hingga dasawarsa pertama tahun 1900, jumlah Sekolah Dasar meningkat hampir 200% (Ramayulis, 2012), dibandingkan dengan jangka waktu yang sama di masa sebelumnya. Tetapi, walaupun pada dasarnya ide politik etis itu adalah bertujuan untuk mengangkat citra penjajah Belanda di mata pribumi, yang dengan cara memajukan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi belum pernah dilaksanakan sungguh-sungguh. Memberikan pendidikan dan kebudayaan Barat kepada masyarakat pribumi sebagai bagian dari pokok-pokok pikiran yang termuat dalam politik etis, mereka nilai sebagai sesuatu tindakan yang mendatangkan bahaya bagi kedudukan Belanda sebagai penguasa. Dikalangan penguasa Hindia Belanda timbul kekhawatiran, kalau-kalau orang pribumi merasa sama (dengan orang Belanda) setelah mereka menguasai kebudayaan, pengetahuan, teknik dan organisasi Barat (Nasution, 1987).

Tetapi betapapun kekhawatiran yang timbul, agaknya kepentingan dan pertimbangan politik lebih mereka utamakan. Karena itu pelaksanaan politik etis secara murni, sedikit banyaknya memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang menyangkut kelanjutan politik kolonialis mereka. Diantara pertimbangan itu adalah *pertama*, memilih sistem pendidikan yang dapat memenuhi tuntutan moral politik etis, tetapi juga dapat mendukung kepentingan politik penjajahnya. *Kedua*, berusaha memenuhi dan bertanggungjawab untuk mendidik dan mencerdaskan rakyat yang mayoritas muslim dan di samping itu juga berusaha meredam kekuatan yang mungkin timbul dari pengaruh fanatisme keagamaan mereka.

Sejauh itu dalam pelaksanaannya pertimbangan dan usaha yang telah mereka buat tidak pernah mencapai hasil sebagaimana yang direncanakan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan, terdapat beberapa kendala diantaranya terbentur oleh masalah pembiayaan. Untuk menyediakan sarana pendidikan itu diperlukan biaya sebesar 417 juta gulden, kira-kira sama dengan besarnya anggaran biaya pemerintah Belanda di Hindia Belanda. Sedangkan langkah kedua juga terbentur karena menurut penilaian mereka, institusi pendidikan Islam yang ada ketika itu tidak memenuhi persyaratan, dan berada di bawah standard ketentuan pemerintah.

Berlandaskan hal tersebut, kaum muslimin harus berusaha menemukan sumber kekuatan Barat dan memilikinya agar pendidikan Islam pada saat itu tidak menimbulkan perasaan keterasingan dan kebingungan bagi masyarakat pribumi setempat. Sementara para pemuka Islam yang meyakini Islam sebagai agama tertinggi dan terakhir, yang meliputi agama-agama lain memandang pembaratan sebagai bencana bagi perkembangan Islam. Usaha ini dilakukan dengan cara mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi Barat untuk memperkuat masyarakat Islam. Kalangan pembaharu ini selanjutnya berpendapat, bahwa faktor yang menyebabkan keterbelakangan umat Islam terletak pada kelemahan sistem pendidikan Islam yang ada (Noer, 1983). Untuk itu mereka mengadakan pembaharuan di bidang pendidikan dengan menyelenggarakan sistem madrasah, sebagai hasil integrasi antara sistem pendidikan Barat dengan sistem pendidikan pesantren.

Di Indonesia usaha dan gerakan pembaharu itu dalam bidang pendidikan dimulai pada pertengahan abad ke-20 (Langgulong, 1988), seperti yang dilakukan oleh Kaum Muda di Minangkabau, Jami'at Khair, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persyarikatan Ulama, Persis dan lain-lainnya. Sebagai dampak sampingan dari pembaharuan dalam berbagai aspek seperti sistem, kelembagaan, administrasi, penyelenggaraan, maupun tamatan institusi pendidikan itu sendiri. Perubahan tersebut, tampaknya memberi kesan, bahwa pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia yang berorientasi pada modernisasi, cenderung menunjukkan dirinya sebagai wujud respon terhadap sekolah-sekolah pemerintah Belanda yang netral agama.

5. Ordonansi Guru

Pendidikan di Indonesia bukan hanya sekedar pertentangan dua kutub keilmuan agama dan umum tetapi juga pertentangan dua pandangan hidup. Kesadaran umat Islam bahwa pemerintah kolonial Belanda adalah “pemerintah kafir”, yang menjajah agama dari negeri mereka. Oleh karena itu, perlakuan yang dilakukan terhadap kolonial Belanda adalah sikap nonkooperatif dan kontradiktif, sampai-sampai uang yang diterima dari pemerintahan Belanda sebagai gaji dinilai sebagai uang haram. Mengharamkan pakaian yang biasa dipakai oleh orang Belanda, dari pihak pemerintah Belanda pun terhadap umat Islam tergambar tentang sikap mereka terhadap pendidikan Islam. Bertolak dari rasa keangkuhan mereka berhadapan dengan pendidikan Islam, yang menurut anggapan mereka bahwa pendidikan barat diformulasikan sebagai faktor yang akan menghancurkan kekuatan Islam di Indonesia. Terlebih-lebih kondisi pendidikan Islam pada waktu yang diperkirakan tidak akan mampu menghadapi superioritas barat.

Dalam bidang pendidikan ini suatu hal dirasakan umat Islam sangat diskriminatif yaitu ordonansi guru pada tahun 1905. Ordonansi ini adalah mewajibkan setiap guru agama Islam untuk meminta dan memperoleh izin terlebih dahulu sebelum melaksanakan tugasnya sebagai guru agama (Daulay, 2012). Ordonansi ini dirasakan oleh guru-guru agama sangat berat terlebih-lebih bagi guru-guru agama yang memiliki administrasi sekolah, selain dari itu, dampak negatif yang dihasilkan ordonansi ini biasa digunakan untuk menekan Islam dikuatkan dengan stabilitas keamanan. Perkembangan berikutnya ordonansi guru tahun 1905 itu akhirnya dicabut karena dianggap tidak relevan lagi maka diganti dengan ordonansi tahun 1925, yang isinya hanya mewajibkan guru agama untuk memberi tahu bukan meminta izin.

Ordonansi ini mendapat reaksi yang keras dari umat Islam misalnya, Kongres al-Islam di Bogor tahun 1926 menolak cara pengawasan terhadap pendidikan agama ini. Muhammadiyah juga dalam Kongres XVII tahun 1928 dengan sangat keras menuntut agar ordonansi guru ini ditarik. Demikian juga reaksi yang datang dari Sumatera Barat.

Dari pihak Belanda sendiri pun timbul juga reaksi terhadap ordonansi guru ini, misalnya Van Der Plass pada tahun 1934, menolak adanya ordonansi ini dengan alasan ordonansi itu sendiri tidak ada gunanya dan dapat menjadi rintangan paling besar bagi karya produktif di Hindia Belanda. Snouck Hurgronja sendiri pun berpendapat bahwa ordonansi ini masih tetap perlu dipertahankan kendatipun ada beberapa usulan perubahan.

Pada awal abad ke-20 Indonesia telah dimasuki oleh ide-ide pembaharuan pemikiran Islam, sekaligus ide-ide itu juga memasuki dunia pendidikan. Salah satu yang terlihat dari pembaharuan pendidikan itu adalah munculnya upaya-upaya pembaharuan dalam bidang materi dan metode. Bidang materi tidak hanya semata-mata berorientasi kepada mata pelajaran agama, tetapi di samping mata pelajaran agama dimasukkan pula mata pelajaran umum. Metode pengajaran telah lebih bervariasi, tidak lagi semata-mata metode membaca kitab dalam bentuk *sorogan* dan *wetonan*, hafalan sekaligus pola pembaharuan juga berkaitan dengan mengubah sistem nonklasikal menjadi klasikal. Sejalan dengan itu pemantapan administrasi pendidikan pun secara bertahap mulai dilaksanakan.

Dampak dari munculnya ide-ide pembaharuan dalam bidang pendidikan memunculkan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang tidak lagi berorientasi pilah antara ilmu agama dan umum, tetapi setidaknya walaupun belum seimbang, sudah memunculkan pemikiran untuk menganggap penting kedua ilmu tersebut. Misalnya dikalangan sekolah-sekolah agama yang diwakili oleh madrasah terutama madrasah yang muncul di Sumatera Barat telah memasukkan ilmu-ilmu umum ke dalam kurikulumnya. Selanjutnya di kalangan sekolah-sekolah umum yang diasuh oleh organisasi lain (HIS, MULO, AMS) memasukkan mata pelajaran agama. Fenomena inilah yang berlangsung pada awal abad ke-20 dan ini menjadi dasar bagi pengembangan penyatuan kedua ilmu ini untuk seterusnya (Daulay, 2012).

Bila diklasifikasikan bentuk dan jenis lembaga pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda pada awal dan pertengahan abad ke-20 adalah:

- a. Lembaga pendidikan pesantren yang masih berpegang secara utuh kepada budaya dan tradisi pesantren, yakni mengajarkan kitab-kitab klasik;
- b. Lembaga pendidikan sekolah-sekolah Islam, di lembaga ini di samping mengajarkan ilmu-ilmu umum sebagai materi pokoknya, juga mengajarkan ilmu-ilmu agama;
- c. Lembaga pendidikan madrasah, lembaga ini adalah mencoba mengadopsi sistem pesantren dan sekolah, dengan menampilkan sistem baru. Ada unsur-unsur yang diambil dari pesantren dan ada pula unsur-unsur yang diambil dari sekolah.

Pendidikan Islam pada Masa Penjajahan Jepang

Setelah Belanda ditaklukan oleh Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, maka Belanda angkat kaki dari Indonesia, semenjak itu mulailah penjajahan Jepang di Indonesia. Dengan semboyan “asia untuk bangsa asia” Jepang menguasai daerah yang berpenduduk lebih dari 400 juta jiwa yang antara lain menghasilkan 50% produksi karet dan 70% timah dunia. Indonesia yang kaya sumber bahan mentah merupakan sasaran yang perlu dibina dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan perang Jepang sehingga Jepang menyerbu Indonesia, karena tanah air Indonesia merupakan sumber bahan-bahan mentah yang kaya raya dan tenaga manusia yang banyak tersebut sangat besar artinya demi kelangsungan perang Pasifik dan hal ini sesuai pula dengan cita-cita politik ekspansinya (Saputra, 1979).

1. Kondisi Pendidikan Pada Masa Jepang

Sistem pendidikan Belanda yang selama ini berkembang di Indonesia, semuanya diganti oleh bangsa Jepang sesuai dengan sistem pendidikan yang berorientasi kepada kepentingan perang. Tidak mengherankan bahwa segala komponen sistem pendidikannya ditujukan untuk kepentingan perang. Tujuan pendidikan pada masa Jepang adalah menyediakan tenaga Cuma-cuma untuk membantu peperangan bagi kepentingan Jepang. Oleh karena itu, murid-murid diharuskan latihan fisik, latihan kemiliteran dan indroktinasi ketat. Pada akhir zaman Jepang terdapat tanda-tanda tujuan menjepangkan anak-anak Indonesia (Hasbullah, 2001).

Proses pembelajaran diganti dengan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan contohnya mengumpulkan batu, pasir untuk kepentingan perang; membersihkan bengkel-bengkel dan asrama militer; menanam umbi-umbian, sayur-sayuran di pekarangan sekolah untuk persediaan makanan; dan menanam pohon jarak untuk pelumas.

2. Kebijakan Jepang terhadap Pendidikan Islam

Walaupun kondisi pendidikan Jepang sedemikian parahnyanya, namun bagi agama Islam ada sedikit nilai positif pada awal masuknya Jepang ke Indonesia. Awalnya masyarakat Indonesia beranggapan kedatangan Jepang akan membawa rakyat keluar dari rasa diskriminatif yang diakibatkan Belanda sebelumnya, namun harapan itu seketika hilang karena pihak Jepang sendiri pun tidak berdiam diri melihat umat Islam di Indonesia. Jepang melihat jumlah kekuatan umat Islam yang mayoritas di Indonesia dapat dijadikan modal dasar kekuatan untuk menghadapi perang Pasifik, perang Asia Timur Raya. Karena itu Jepang selalu mengulang-ulang menyampaikan maksudnya yaitu menghormati dan menghargai Islam. Di depan ulama, Letnan Jenderal Imamura pejabat militer Jepang tertinggi di Jawa menyampaikan pidato yang isinya bahwa pihak Jepang bertujuan untuk melindungi dan menghormati Islam.

Pemerintah Jepang menampakkan diri seakan membela kepentingan Islam, yang merupakan siasat untuk kepentingan perang dunia dua. Untuk mendekati ummat Islam, mereka menempuh beberapa kebijakan, di antaranya ialah:

- a. Kantor Urusan Agama yang ada pada zaman Belanda disebut *Kantoor Voor Islamistische Zaken* yang dipimpin oleh orang-orang orientalis Belanda, diubah oleh Jepang menjadi kantor *sunubi* yang dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari;

- b. Para ulama Islam bekerja sama dengan pimpinan-pimpinan orientalis diizinkan membentuk barisan pembela tanah air (PETA);
- c. Sekolah negeri diberi pelajaran budi pekerti yang isinya identik dengan ajaran agama;
- d. Pemerintah Jepang mengizinkan berdirinya sekolah tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh KH. Wahid Hasyim, Kahar Muzakir dan Bung Hatta (Ramayulis, 20120).

3. Perkembangan Pendidikan Islam pada Masa Penjajahan Jepang

Sikap penjajah Jepang terhadap pendidikan Islam ternyata lebih lunak, sehingga ruang gerak pendidikan lebih bebas dibandingkan pada zaman pemerintahan kolonial Belanda. Hal ini memberikan kesempatan bagi pendidikan Islam untuk berkembang.

Madrasah. Awal pendudukan Jepang, madrasah berkembang dengan cepat terutama dari segi kuantitas. Hal ini dapat dilihat terutama di daerah Sumatera yang terkenal dengan madrasah awaliyahnya, yang diilhami oleh majelis ulama tinggi.

Pendidikan Agama di Sekolah. Sekolah negeri diisi dengan pelajaran budi pekerti. Hal ini memberi kesempatan pada guru agama Islam untuk mengisinya dengan ajaran agama, dan di dalam pendidikan agama tersebut juga dimasukkan ajaran tentang jihad melawan penjajah.

Perguruan Tinggi Islam. Pemerintah Jepang mengizinkan berdirinya pendidikan tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh KH. Wahid Hayim, kh. Muzakkar dan Bung Hatta. Walaupun Jepang berusaha mendekati umat Islam dengan memberikan kebebasan dalam beragama dan dalam mengembangkan pendidikan namun para ulama tidak akan tunduk kepada pemerintahan Jepang, apabila mereka mengganggu akidah umat hal ini dapat mengakibatkan pertentangan dari umat Islam.

Meskipun dunia pendidikan secara umum terbengkalai, karena murid-muridnya sekolah setiap hari hanya disuruh gerak badan, baris-berbaris, kerja bakti (*romusha*), bernyanyi dan sebagainya. Yang lumayan beruntung adalah madrasah-madrasah yang ada di dalam lingkungan pondok pesantren yang bebas dari pengawasan langsung Jepang. Pendidikan dalam pondok pesantren masih dapat berjalan secara wajar.

Kebijakan Jepang secara umum tersebut tentu pula berpengaruh kepada kebijakannya dalam hal pendidikan Islam di Indonesia. Dalam hal ini keruwetan dalam bidang admistrasi dihapuskan demi kepentingan gerakan Islam di tahun 1944. Jepang menyadari bahwa mengatur sekolah swasta lebih sulit dari sekolah-sekolah negeri. Sebab bagi sekolah-sekolah negeri pemerintah Jepang dapat mengangkat kepala sekolah dari Jepang untuk mengatur sekolah-sekolah tersebut.

Kebijakan Jepang dalam pendidikan Islam ini adalah pada tingkat rendah Jepang merasa puas tidak mengawasinya secara langsung, berbeda dengan tingkat lanjutan, sekolah guru diawasi dan diatur oleh mereka sendiri. Di antara aturan-aturan yang ditegaskan oleh pemerintah Jepang dalam bidang pendidikan Islam adalah pada tahun 1943 melarang pengajaran agama yang tidak wajib di sekolah-sekolah lanjutan negeri. Selanjutnya di bulan yang sama didirikanlah organisasi yang bernama Pergaboean Goeroe Islam Indonesia, sebuah organisasi guru Islam yang dibentuk oleh pemerintah Jepang.

Pendidikan pada masa Jepang di Indonesia, memperlihatkan gambaran yang buruk, bila dibandingkan dengan masa pemerintahan Belanda. Sebagai gambaran adalah jumlah sekolah dasar dari 21.500 menurun menjadi 13.500, sekolah lanjutan dari 850 menjadi 20. Perguruan tinggi yang terdiri dari 4 buah tidak dapat melakukannya. Jumlah murid sekolah dasar merosot 30%, sekolah menengah 90%. Guru sekolah dasar berkurang 35%, guru sekolah menengah aktif sekitar 5%.

Masa penjajahan Jepang rakyat Indonesia dipaksa untuk melakukan penghormatan kepada *Tenno* (Kaisar) yang dipercayai sebagai keturunan dewa matahari (*Omiterasi Omikami*). Sistem penghormatan kepada kaisar dengan cara membungkukkan badan menghadap *Tenno*,

disebut dengan Seikeirei. Penghormatan ini biasanya diikuti dengan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang (Kimiyago). Tidak semua rakyat Indonesia dapat menerima kebiasaan ini, khususnya dari kalangan Agama. Penerapan Seikerei ini ditentang umat Islam, salah satunya perlawanan yang dilakukan KH. Zainal Mustafa, seorang pemimpin pondok pesantren Sukamanah Jawa Barat. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa Singapura.

Kesimpulan

Kondisi pendidikan Islam di zaman Belanda, berbagai macam kebijakan dan pendekatan telah dilakukan oleh Belanda dalam wilayah jajahannya, yang umumnya kebijakan mereka merugikan masyarakat. Menjelang abad ke-20 ada beberapa kebijakan pendidikan Belanda di Indonesia yang secara signifikan berpengaruh terhadap pendidikan yaitu Politik Etis dan Ordonansi Guru. Sedangkan pada masa penjajahan Jepang sistem pendidikan yang berorientasi kepada kepentingan perang. Tujuan pendidikan pada masa Jepang adalah menyediakan tenaga Cuma-cuma untuk membantu peperangan bagi kepentingan Jepang. Oleh karena itu, murid-murid diharuskan latihan fisik, latihan kemiliteran dan indroktinasi yang sangat ketat.

Daftar Pustaka

- Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan. (1979). *Pendidikan dari Zaman ke Zaman*. Jakarta: Depdikbud.
- Daulay, H.P. (2012). *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hasbullah. (1999). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah dan Perkembangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasbullah. (2001). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Langgulang, H. (1988). *Pendidikan Islam Menghadapi Abad ke-21*. Jakarta: al-Husna, 1988.
- Napitupulu, D. S. (2019). Romantika Sejarah Kejayaan Islam di Spanyol. *Mukadimah: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1), 7-18.
- Nasution, S. (1987). *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Bandung: Jemmers.
- Nizar, S. (2007). *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah sampai Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Noer, D. (1983). *Administrasi Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Ramayulis. (2009). *Dasar-dasar Kependidikan*. Padang: The Zaki Press.
- Ramayulis. (2012). *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Saputra, D. (1979). *Sejarah Pendidikan*. Bandung: Media Group.
- Suyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Literasi Media Publishing.